

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mendapatkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan hak setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia yang diatur dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia berhak atas penghidupan dan kehidupan yang layak, akan tetapi kemiskinan semakin akut, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) (2/4/2016) mencatat penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga September 2015 mencapai 28,51 juta atau 11,13% dari total penduduk Indonesia. Namun, jika dibanding periode September 2014 angka terus meningkat. Pada periode September 2014 jumlah penduduk miskin masih sekitar 27,73 juta jiwa atau 10,96% dari penduduk Indonesia. Dibanding September 2015, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 780 ribu jiwa. (BPS, 2015).

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 naik menjadi 10,65 juta orang atau naik 0,29 juta orang dari posisi September 2014 sebesar 10,36 juta orang. Secara presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16%, naik menjadi 8,29% pada Maret 2015. Sementara, jumlah penduduk di daerah pedesaan naik 0,57 juta orang, yakni dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015. Jika dihitung secara persentase, penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 13,76% pada September 2014 menjadi 14,21% pada Maret 2015.

Pada periode tahun 2013, sebagaimana dalam data Statistik BPS No.06/01/Th.XVIII, tanggal 2 Januari 2015 dalam portal [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), yang bertajuk Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2014, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen dan berkurang sebesar 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 8,34 persen, turun menjadi 8,16 persen pada September 2014. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 14,17 persen pada Maret 2014, menjadi 13,76 persen pada September

2014. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2015, pasca terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di tahun 2013.

Demikian juga dengan persoalan perempuan yang masih kompleks, disebabkan karena berbagai pandangan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya, tidak dapat membedakan hal yang bersifat kodrat dan hal yang bersifat bentukan/gender. Pandangan tersebut telah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat, sudah pula membudaya bahwa tugas seorang perempuan adalah memasak, berdandan dan melahirkan anak. Tidak heran kedudukan perempuan terkadang menjadi nomor dua. Dalam bidang pendidikan, kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi merata secara adil. Demikian juga dengan persoalan kemiskinan perempuan, bahwa angkatan kerja perempuan baik di perkotaan maupun pedesaan lebih rendah dibanding laki-laki : (  $P = 45,47\% < L = 81,19\%$  ), upah/gaji yang diterima pekerja perempuan jauh lebih rendah dari yang diterima pekerja laki-laki (pedesaan dan perkotaan), tingkat pengangguran terbuka pada perempuan lebih besar dari laki-laki (  $P = 7,50\%; L = 6,7\%$  ) di pedesaan dan perkotaan, serta curahan waktu kerja perempuan untuk kegiatan produksi maupun reproduksi lebih besar dibandingkan laki-laki/suami.

Dalam Jurnal Perempuan edisi 42 dengan judul “*Mengurai Kemiskinan, Dimana Perempuan?*” yang dirilis dari data International (PBB) menyatakan bahwa 1/3 penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu sekitar 70 % dari 1/3 itu adalah perempuan.

Tahun 2010, UNDP mengukur ketimpangan/ketidaksetaraan gender/*Gender Inequality Index (GII)*. Indeks ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender. Kesenjangan yang terjadi disebabkan adanya diskriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Terjadinya diskriminasi pada salah satu gender dapat diukur dengan GII. Nilai GII berkisar dari 0 hingga 1. Perempuan dan laki-laki dikatakan memiliki kehilangan kesempatan yang sama jika GII berkisar 0. Nilai berkisar 1 menunjukkan perempuan kehilangan lebih banyak dibandingkan laki-laki dari keseluruhan dimensi yang diukur. Semakin tinggi nilai GII maka semakin besar diskriminasi. GII diukur berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Terdapat dua indikator pengukur dimensi kesehatan

yaitu tingkat kematian ibu dan tingkat kesuburan remaja. Begitu juga dengan dimensi pendidikan yang diukur dengan dua indikator yaitu capaian tingkat pendidikan menengah dan tinggi untuk tiap gender serta proporsi kursi parlemen dipegang oleh setiap laki-laki atau perempuan. Dimensi tenaga kerja diukur dengan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Kelima indikator ini akan menghasilkan beberapa indeks hingga diperoleh dua indeks besar yaitu indeks laki-laki dan indeks perempuan yang akan dihitung menjadi Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Dalam konteks global, perbandingan IPM antarnegara ASEAN selama tahun 1990-2012 sebagaimana UNDP sampaikan bahwa Singapura dan Brunai Darussalam merupakan Negara dengan capaian IPM sangat tinggi, sedangkan Malaysia menjadi negara dengan nilai IPM yang tinggi selama tahun 1990-2012. Nilai IPM ketiga negara tersebut masing-masing adalah 0,895; 0,855; dan 0,769 untuk tahun 2012. Sedangkan nilai IPM terendah diperoleh Myanmar diantara negara lain di wilayah ASEAN yaitu 0,498 pada tahun 2012. Peringkat terendah berikutnya adalah Laos dan Kamboja dengan nilai IPM di tahun 2012 berturut turut adalah 0,543 dan 0,543. Untuk negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke-6, dengan nilai capaian sebesar 0,629. Posisi yang sama seperti pada dua dekade sebelumnya.

Demikian juga dengan kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan, dengan potensi Sumber Daya Alam yang memadai seringkali tidak sepadan dengan pendapatan dan kehidupannya yang layak. Masyarakat nelayan sebagai anak bangsa seringkali menjadi objek dari sebuah pembangunan. Tonggak pembangunan semestinya berdasar pada basis kebutuhan masyarakat, yaitu pembangunan yang dilakukan dengan sistem *bottom up* dimana sistem yang berdasar pada aspirasi masyarakat dan proses yang melibatkan masyarakat secara langsung. Berbeda dengan konsep pembangunan yang menggunakan mekanisme *top down*, yaitu konsep yang murni realisasi pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pentingnya pelibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, dari awal sampai dengan akhir.

Novi Dwi Harini (2012), bahwa *Stereotype* masyarakat miskin umumnya melakat bagi masyarakat wilayah pesisir pantai di Indonesia. Akan tetapi *stereotip* itu tidak berlaku bagi Masyarakat Desa Suradadi. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Suradadi cukup tinggi. Hal ini sebabkan karena adanya proses transformasi masyarakat dari *miyangan* (nelayan tradisional) ke *longlengan* (nelayan moderen). Proses transformasi tersebut dipengaruhi oleh adanya peran serta jaringan sosial yang ada di masyarakat pesisir Desa Suradadi. Dalam penelitian ini penulis mengeksplorasi alasan yang melatar belakangi nelayan *miyangan* beralih ke *longlengan*, peran jaringan sosial terhadap akses kerja para calon nelayan *longlengan*, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian adalah nelayan (*longlengan*). Hasil penelitiannya adalah bahwa faktor ekonomi, prestise, keinginan untuk melihat dunia luar merupakan dasar keputusan menjadi nelayan *longlengan*. Jaringan sosial yang digunakan nelayan *longlengan* adalah dengan berbagi informasi dan keberadaan broker. Dampak adanya nelayan *longlengan* adalah perubahan ekonomi, penghargaan sosial yang lebih tinggi terhadap profesi *longlengan*, perubahan gaya hidup, perubahan relasi dan nilai dalam keluarga, serta tranformasi profesi.

Sarah Santi (2007), menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai kemiskinan ekonomi, namun memiliki persoalan yang lebih luas. Kemiskinan ekonomi hanya dapat di atasi jika kemiskinan diberbagai aspek lain kehidupan juga diatasi, seperti kemiskinan pengetahuan atas sanitasi, kemiskinan akses dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemiskinan perlindungan, dan sebagainya. Yang disebut sebagai kemiskinan multi wajah. Kemiskinan sangat dekat dengan perempuan karena perempuan lebih rentan terhadap pemiskinan, khususnya pemiskinan struktural. Para feminis menyatakan bahwa seringkali kemiskinan berwajah perempuan, karena perempuan paling menderita dalam situasi miskin yang sama bila dibandingkan dengan laki-laki. Kebijakan yang diskriminatif dalam penerapan otonomi daerah telah memarjinalkan partisipasi perempuan dalam persoalan-persoalan publik. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan sangat penting untuk mengubah kebijakan, aturan main, praktik, dan perilaku institusi.

Anshar Arifin, salah satu organisasi sosial yang turut memberi kontribusi dalam membangun sistem sosial kenelayanan di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara adalah kelembagaan *Ponggawa-Sawi*. Relasi Ponggawa Sawi di daerah penelitian ini merupakan

sebuah organisasi dalam sistem sosial kenelayanan di wilayah pesisir yang tumbuh dan berkembang secara organik. Penelitian ini mengkaji “dualitas antara Struktur dan Aktor” dalam “praktik-praktik social” masyarakat nelayan yang menghubungkan dengan “perangkap kemiskinan” yaitu ketidakberdayaan, kerawanan, kelemahan fisik, tingkat pendapatan yang rendah dan isolasi. Struktur relasi *Ponggawa-Sawi* merupakan medium (perantara) interaksi yang sekaligus sebagai instrument bagi para pelaku jaringan.

Diyah Maruti Handayani dan Oksiana Jatiningih, mengungkapkan pandangan tentang pemberdayaan perempuan dan posisi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Fatayat NU PAC Tarokan dapat dilihat dari pandangan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Penelitian ini dilihat dari tiga kategorisasi yaitu, pendidikan, daerah asal, dan status. Terdapat perbedaan pandangan mengenai pemberdayaan perempuan yang digolongkan menjadi dua yaitu (1) perempuan dapat mencegah dan mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan (2) perempuan dapat meningkatkan kemandirian dalam keuangan. Terkait dengan pandangan posisi perempuan, semua subjek penelitian memandang bahwa perempuan tidak bisa disetarakan dengan laki-laki karena (1) perempuan mempunyai fisik yang lemah dan lebih emosional, (2) perempuan identik bekerja di dalam rumah. Berdasarkan pandangan tersebut menunjukkan bahwa para pengurus dan anggota sebagai agen masih berpandangan patriarkhi. Hasil penelitian menunjukkan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan Fatayat NU PAC Tarokan mencakup tiga bidang yaitu (1) bidang pengkaderan, meliputi pelatihan kemandirian dan kepemimpinan, (2) bidang kesehatan, meliputi workshop tentang kesehatan reproduksi perempuan dan pencegahan HIV/AIDS, dan (3) bidang dakwah, meliputi pengajian dan diskusi seperti cara mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan, para agen Fatayat NU Tarokan belum mempunyai pola pikir kritis dan kemampuan untuk memutuskan sehingga belum menuju transformasi pemberdayaan yang sesuai dengan nilai egalitarian.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam laporan program Pengarusutamaan Gender tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan mandat dari peraturan perundangan dengan dasar hukum yang melandasinya, sebagaimana dalam *lampiran*, juga dalam buku “implementasi PUG Kementerian Kelautan dan Perikanan” yang dibuat oleh Kelompok

Kerja Pengarusutamaan Gender di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014, bahwa Pengarusutamaan Gender dalam program menjadi prinsip dalam empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan) dengan menetapkan tiga misi yang diembannya, yakni mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan dan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. Demikian juga dalam rangka penguatan pelaksanaan PUG di KKP, telah disusun pula beberapa pedoman sebagai acuan bagi pelaksana di lingkup KKP sebagaimana dalam *lampiran*.

Penelitian ini mengambil fokus pada persoalan Pemberdayaan Perempuan dengan menganalisa proses, dimensi penghambat dan pendukung serta dampak pemberdayaan, menggunakan analisa Strukturasi *Giddens* dengan lokus di daerah yang tersasar program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberinama KIMBis [Klinik IPTEK Mina Bisnis]. Di wilayah KIMBis ini, banyak potensi-potensi tambak di Brebes itu sudah di tinggalkan akibat kerusakan karena tindakan manusia dan tidak mampu dipulihkan. Brebes yang struktur dan jaringan sosial berlatar belakang ekonomi utamanya adalah Bawang Merah, maka daya tarik untuk masyarakat bekerja di bawang merah itu besar. Selain itu banyaknya migrasi ke wilayah lain dan potret keberlanjutan kehidupan masyarakat ini lah yang menjadi latar belakang penelitian ini.

KIMBis perdana dimulai pada tahun 2011 sebanyak 5 buah yaitu di Desa Langensari Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Desa Sidharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, serta Desa Kampuh Bungan dan Desa Muara Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Kemudian pada 2012 6 KIMBis berikutnya dibentuk di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Desa Deah Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Desa Ponjong Kecamatan Genjahan Kabupaten Gunung Kidul, Desa Wiring Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dan Desa Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Satu tahun kemudian yaitu 2013

dibentuk lagi KIMBis di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lombok Timur dan Kawasan Danau Toba.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses Pemberdayaan Perempuan di komunitas KIMBis-Brebes ?
2. Apa dimensi penghambat (*constrain*) dan pendukung (*enabling*) dalam pemberdayaan perempuan ?
3. Bagaimanakah dampak pemberdayaan perempuan di komunitas KIMBis Brebes ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses Pemberdayaan Perempuan di komunitas KIMBis-Brebes.
2. Untuk mengetahui dimensi penghambat (*constrain*) dan pendukung (*enabling*) dalam Pemberdayaan Perempuan.
3. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan perempuan di komunitas KIMBis Brebes.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, manfaat penelitian tesis ini adalah akan menambah wacana keilmuan dalam literatur tentang konsep pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan di sektor perikanan dan kelautan. Tesis ini menggunakan teori Strukturasi *Anthony Giddens*, dimana Teori Strukturasi *Anthony Giddens* ini adalah untuk melihat hubungan antar aktor (agen) dan struktur. Jon Sobrino (Sabrino, 1993). Teori strukturasi ini adalah proses dinamis untuk mengkonstruksi masyarakat, yaitu tarik menarik antara *Struktur* (system, regulasi, aturan main, kelas sosial) dengan *Agensi* (Para aktor pelaku sosial dan tindakan nya, baik individu atau kolektif).
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan dalam hal pemberdayaan perempuan di sektor perikanan dan kelautan, serta pengetahuan bagi masyarakat umum.